



Judul : Kabinet mestinya miskin struktur, kaya fungsi
Tanggal : Selasa, 14 Mei 2024
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Kabinet Mestinya Miskin Struktur, Kaya Fungsi

PAN menyebut, apabila struktur kabinet sudah disusun, hal itu dipastikan sebagai bagian dari pelaksanaan amanat dan janji presiden terpilih.

YAKUB PRYATAMA WIJAYAATMAJA
yakub.p@mediaindonesia.com

ANGGOTA Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyoroti wacana perombakan nomenklatur kementerian pada pemerintahan baru mendatang. Alih-alih menambah jumlah kementerian, pemerintahan ke depan seharusnya miskin struktur tapi kaya fungsi.

Politikus Fraksi PKS itu menilai, jika wacana tersebut benar-benar dieksekusi, harus ada kajian mendalam dari berbagai sudut pandang, apalagi menyangkut urusan sektor pendidikan. "Saya agak menolak tentang pembengkakan (nomenklatur) kementerian ini. Seharusnya reformasi birokrasi itu rumusnya sederhana, yaitu miskin struktur, kaya fungsi. Jangan sampai justru makin banyak struktur, malah koordinasinya

Mardani pun mengingatkan bahwa penambahan nomenklatur kementerian menye-

babkan gemuknya birokrasi, serta akan menimbulkan deretan permasalahan. Tidak hanya itu, kata Mardani, jika ego sektoral kerap terjadi, berpotensi akan makin memperumit akibat gemuknya birokrasi. "Jangan sampai jadi terikat dengan birokrasi, lalu menciptakan berbagai regulasi yang saling bertentangan," tegas Mardani.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Junimart Girsang. Ia membeberkan perlu ada dasar dan alasan kebutuhan apabila ada penambahan kementerian. "Rencana adanya penambahan kursi kabinet Prabowo-Gibran tentu harus ada dasar dan alasan kebutuhan yang memang keharusan untuk kepentingan percepatan kerja-kerja kebutuhan pemerintahan bagi rakyat. Bukan karena kepentingan politik atau bagi-bagi kekuasaan yang berdampak

Di lain pihak, Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay menerangkan bahwa

Seharusnya reformasi birokrasi itu rumusnya sederhana, yaitu miskin struktur, kaya fungsi. Jangan sampai justru makin banyak struktur, malah koordinasinya jadi berantakan.

penyusunan kabinet masih berproses. Struktur dan nomenklatur pun masih dibahas dengan mempertimbangkan segala saran dan masukan. "Saya heran, ini kan masih berproses. Semua masih menunggu kajian dan pertimbangan dari berbagai pihak. Kenapa tiba-tiba sudah ada yang menunjukkan sikap resisten?" ungkapnya.

Saleh menegaskan pembentukan kabinet adalah hak pre-

dengan arah dan orientasi pembangunan yang akan dilakukan. "Karena itu, kalau

nanti struktur kabinet sudah disusun, itu dipastikan sebagai bagian dari pelaksanaan amanat dan janji. Mandat yang diberikan rakyat harus dipenuhi," tambahnya.

Bagi-bagi kekuasaan

Pakar hukum tata negara Herdiansyah Hamzah Castro menegaskan rencana penambahan kursi menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran hanya demi mengakomodasi jatah koalisi. Menurutnya, rencana mengubah Undang-Undang Kementerian Negara dilakukan untuk kepentingan kelompok dan golongan sendiri.

"Bahkan semua ditabrak dan dilakukan dengan cara ugul-ugalan. Jadi tidak mengherankan kalau UU kementerian juga hendak diubah demi untuk mengakomodasi penambahan jatah koalisi. Padahal usulan penambahan tersebut sama sekali tidak punya *ratio legis* (tujuan dari lahirnya peraturan hukum) yang memadai," ungkapnya.

Dalam perspektif politik hukum, kata Castro, langkah penggemukan kursi menteri dilakukan dalam upaya me-

"Tidak ada faedahnya untuk publik sama sekali," ucapnya. (P-2)